



BUPATI GIANYAR
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2021

TENTANG

BESARNYA NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI
DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GIANYAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah Sebagai Dasar Pengenaan Pajak Air Tanah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang – Undang Nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405)
6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
9. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pedoman Penetapan Nilai Perolehan Air Tanah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 408);
10. Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pajak Air Tanah (Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2010

Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 18);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BESARNYA NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Gianyar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gianyar.
3. Bupati adalah Bupati Gianyar.
4. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut Kepala BPKAD adalah Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar.
6. Pajak Air Tanah adalah Pajak atas pengambilan dan pemanfaatan air tanah untuk digunakan bagi orang pribadi atau Badan, kecuali untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat serta peribadatan.
7. Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
8. Nilai Perolehan Air Tanah yang selanjutnya disingkat NPAT adalah nilai Air Tanah yang telah diambil dan dikenai Pajak pemanfaatan air tanah, besarnya sama dengan volume air yang diambil dikalikan dengan Harga Dasar Air.
9. Harga Dasar Air yang selanjutnya disingkat HDA adalah harga Air Tanah yang akan dikenai Pajak pemanfaatan Air Tanah.
10. Volume adalah banyaknya Air Tanah yang digunakan.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai pedoman dalam menetapkan NPAT berdasarkan HDA.
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini sebagai dasar penghitungan pengenaan Pajak Air Tanah.

BAB II
OBJEK PAJAK
Pasal 3

- (1) Objek Pajak Air Tanah yaitu pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah.
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak Air Tanah yaitu pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian dan perikanan rakyat, serta peribadatan.
- (3) Apabila pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dihentikan sementara atau selamanya maka Wajib Pajak diharuskan melaporkan kepada Kepala BPKAD.

BAB III
DASAR PENGENAAN PAJAK
Pasal 4

- (1) Dasar Pengenaan Pajak yaitu NPAT.
- (2) NPAT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil kali volume dengan HDA.
- (3) HDA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Volume sebagaimana dimaksud pasal 4 ayat (2) didasarkan catatan meter air dan/atau alat ukur lainnya.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI GIANYAR
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
BESARNYA NILAI PEROLEHAN AIR TANAH SEBAGAI DASAR PENGENAAN PAJAK AIR TANAH

HARGA DASAR AIR TANAH MENURUT PERUNTUKAN DAN VOLUME PENGAMBILAN AIR TANAH

| NO | KLASIFIKASI SUBYEK PAJAK | DI DALAM JANGKAUAN PDAM | | | | | DI LUAR JANGKAUAN PDAM | | | | |
|-----|--|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | 0 S/D 50 M ³ | 51 S/D 500 M ³ | 501 S/D 1000 M ³ | 1001 S/D 2500 M ³ | > 2500 M ³ | 0 S/D 50 M ³ | 51 S/D 500 M ³ | 501 S/D 1000 M ³ | 1001 S/D 2500 M ³ | > 2500 M ³ |
| | | HARGA DASAR AIR (Rp./M ³) | | | | | HARGA DASAR AIR (Rp./M ³) | | | | |
| I | KEGIATAN PELAYANAN JASA SOSIAL | | | | | | | | | | |
| | 1. Lembaga Pendidikan | 1.026 | 1.083 | 1.140 | 1.197 | 1.254 | 615 | 649 | 684 | 718 | 752 |
| | 2. Usaha Pelayanan Kesehatan | 3.078 | 3.249 | 3.420 | 3.591 | 3.762 | 1.846 | 1.949 | 2.052 | 2.154 | 2.257 |
| | 3. Kegiatan Jasa Sosial Lainnya | 513 | 541 | 570 | 599 | 627 | 307 | 324 | 342 | 359 | 376 |
| II | KEGIATAN USAHA KEBUTUHAN PRIMER | | | | | | | | | | |
| | 1. Pabrik Es dan Produsen Air Mineral | 2.052 | 2.166 | 2.280 | 2.394 | 2.508 | 1.231 | 1.299 | 1.368 | 1.436 | 1.504 |
| | 2. Pabrik Minuman | 6.156 | 6.498 | 6.840 | 7.182 | 7.524 | 3.693 | 3.898 | 4.104 | 4.309 | 4.514 |
| | 3. Warung Makan | 2.052 | 2.166 | 2.280 | 2.394 | 2.508 | 1.231 | 1.299 | 1.368 | 1.436 | 1.504 |
| | 4. Usaha Jasa Cuci dan setrika (Laundry) | 4.104 | 4.332 | 4.560 | 4.788 | 5.016 | 2.462 | 2.599 | 2.736 | 2.872 | 3.009 |
| | 5. Usaha Jasa Cuci Kendaraan | 4.104 | 4.332 | 4.560 | 4.788 | 5.016 | 2.462 | 2.599 | 2.736 | 2.872 | 3.009 |
| | 6. Usaha Pabrik Beton | 18.468 | 19.494 | 20.520 | 21.546 | 22.572 | 11.080 | 11.696 | 12.312 | 12.927 | 13.543 |
| | 7. Usaha Perawatan Kain | 6.156 | 6.498 | 6.840 | 7.182 | 7.524 | 3.693 | 3.898 | 4.104 | 4.309 | 4.514 |
| | 8. Rumah Kos | 2.052 | 2.166 | 2.280 | 2.394 | 2.508 | 1.231 | 1.299 | 1.368 | 1.436 | 1.504 |
| | 9. Pertokoan | 2.052 | 2.166 | 2.280 | 2.394 | 2.508 | 1.231 | 1.299 | 1.368 | 1.436 | 1.504 |
| | 10. Perkantoran | 1.026 | 1.083 | 1.140 | 1.197 | 1.254 | 615 | 649 | 684 | 718 | 752 |
| | 11. Usaha Kebutuhan Primer Lainnya | 1.026 | 1.083 | 1.140 | 1.197 | 1.254 | 615 | 649 | 684 | 718 | 752 |
| III | KEGIATAN USAHA KEBUTUHAN SEKUNDER | | | | | | | | | | |
| | 1. Rumah Makan | 6.156 | 6.498 | 6.840 | 7.182 | 7.524 | 3.693 | 3.898 | 4.104 | 4.309 | 4.514 |
| | 2. Restoran | 9.234 | 9.747 | 10.260 | 10.773 | 11.286 | 5.540 | 5.848 | 6.156 | 6.464 | 6.771 |
| | 3. Pondok Wisata dan hotel Melati | 6.156 | 6.498 | 6.840 | 7.182 | 7.524 | 3.693 | 3.898 | 4.104 | 4.309 | 4.514 |
| | 4. Hotel Bintang 1, 2 dan 3 | 12.312 | 12.996 | 13.680 | 14.364 | 15.048 | 7.387 | 7.797 | 8.208 | 8.618 | 9.028 |
| | 5. Hotel Bintang 4 dan 5 | 18.468 | 19.494 | 20.520 | 21.546 | 22.572 | 11.080 | 11.696 | 12.312 | 12.927 | 13.543 |

- (2) Meter air dan/atau alat ukur lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasangkan pada setiap tempat pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Tanah.
- (3) Apabila meter air rusak, besarnya jumlah pengambilan dan pemanfaatan Air Tanah dapat berpedoman pada rata-rata pemakaian selama 3 (tiga) bulan terakhir.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2011 tentang Besarnya Nilai Perolehan Air Tanah (NPAT) Dalam Pengenaan Pajak Air Tanah (Berita Daerah Kabupaten Gianyar Tahun 2011 Nomor 21) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku .

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gianyar

Ditetapkan di Gianyar
Pada tanggal 15 Pebruari 2021
BUPATI GIANYAR,


I MADE MAHAYASTRA

Diundangkan di Gianyar
pada tanggal 15 Pebruari 2021
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GIANYAR,



I MADE GEDE WISNU WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN GIANYAR TAHUN 2020 NOMOR 6

| NO | KLASIFIKASI SUBYEK PAJAK | DI DALAM JANGKAUAN PDAM | | | | | DI LUAR JANGKAUAN PDAM | | | | |
|----|---|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| | | 0 S/D 50 M ³ | 51 S/D 500 M ³ | 501 S/D 1000 M ³ | 1001 S/D 2500 M ³ | > 2500 M ³ | 0 S/D 50 M ³ | 51 S/D 500 M ³ | 501 S/D 1000 M ³ | 1001 S/D 2500 M ³ | > 2500 M ³ |
| | | HARGA DASAR AIR (Rp./M ³) | | | | | HARGA DASAR AIR (Rp./M ³) | | | | |
| | 6. Villa tanpa Private Private Pool | 12.312 | 12.996 | 13.680 | 14.364 | 15.048 | 7.387 | 7.797 | 8.208 | 8.618 | 9.028 |
| | 7. Villa dengan Private Pool | 18.468 | 19.494 | 20.520 | 21.546 | 22.572 | 11.080 | 11.696 | 12.312 | 12.927 | 13.543 |
| | 8. Perawatan Tubuh dan Kecantikan (Salon) | 6.156 | 6.498 | 6.840 | 7.182 | 7.524 | 7.387 | 3.898 | 4.104 | 4.309 | 4.514 |
| | 9. Perawatan Tubuh dan Kecantikan (Spa) | 18.468 | 19.494 | 20.520 | 21.546 | 22.572 | 11.080 | 11.696 | 12.312 | 12.927 | 13.543 |
| | 10. Lapangan Golf | 6.156 | 6.498 | 6.840 | 7.182 | 7.524 | 3.693 | 3.898 | 4.104 | 4.309 | 4.514 |
| | 11. Kolam Renang/ Wahana Hiburan Air | 3.078 | 3.249 | 3.420 | 3.591 | 3.762 | 1.846 | 1.949 | 2.052 | 2.154 | 2.257 |
| | 12.. Usaha Kebutuhan Sekunder Lainnya | 1.539 | 1.624 | 1.710 | 1.796 | 1.881 | 923 | 974 | 1.026 | 1.077 | 1.128 |
| IV | KEGIATAN DENGAN TARIF KHUSUS | | | | | | | | | | |
| | 1. PDAM | 154 | 162 | 171 | 180 | 188 | 92 | 97 | 102 | 108 | 113 |
| | 2. Usaha Rumah Tangga | 1.026 | 1.083 | 1.140 | 1.197 | 1.254 | 615 | 649 | 684 | 718 | 752 |
| | 3. Usaha Jasa Pelabuhan | 5.472 | 5.776 | 6.080 | 6.384 | 6.688 | 3.283 | 3.465 | 3.648 | 3.830 | 4.012 |

BUPATI GIANYAR,

I MADE MAHAYASTRA